B A B II LANDASAN TEORITIS

A. PARTISIPASI MASYARAKAT

Banyak orang berpendapat bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka bersama, merencanakan usaha pemenuhannya dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Pembangunan masyarakat ditujukan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan, kemelaratan dan kebobrokan ingkungan hudup masyarakat, karena hal demikian menurunkan kualitas dan kelemahan semangat serta kemampuan masyarakat. Salah ssatu jalur untuk merealisasikan pembangunan adalah melalui lembaga pendidikan.

Sebagai salah satu elemen proses pembangunan masyarakat adaalah adanya partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Masyarakat hendaknya diminta dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian Partisipasi Masyarakat.

Untuk menghindari kesalahan presepsi kita tentang partisipasi masyarakat, maka perlu kiranya penulis menjelaskan apa yang dimaksud partisipasi, masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Kata partisipasi besrasal dari bahasa Inggris partisipation yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan.¹

Dalam Ensiklopedia Pendidikan menyatakan partisipasi adalah:

Suatu gejala demokrasi, dimana orang diikut sertakan didalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga menanggung tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Partisipasi itu terjadi baik dibidang-bidang fisik maupun dibidang mental serta dibidang penentuan kebijaksanaan.²

Dalam kamus sosiologi juga dinyatakan pengertian partisipasi yaitu, "setiap

¹ Jhon M. Echols, Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1976), 419.

² Soegarda Poerwahawatja, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta; PT.Gunung Agung, 1982), 209.

Proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam situasi tertentu."

Jnanabrota Ehattacharyya dalam buku *Pembangunan Masyarakat* mengartikan partisipasi sebagai , "Pengambilan bagian dalam kegiatan bersama."

Mubyyarto dalam buku yang sama mendefinisikan partisipasi sebagai, "Kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri."

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikut sertaan dalam suatu kegiatan baik dibidang fisik maupun non fisik, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kegiatan.

Sedangkan pengertian masyarakat adalah, "Pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan tertentu."

Menurut Soleman B. Taneko, masyarakat merupakan:

Suatu sistem yang terbentuk kerena hubungan dari anggota-angotanya. Dengan lain perkataan, masyarakat ialah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.⁷

Definisi masyarakat yang lain dikemukakan oleh para sarjana seperti :

- Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya ddan berfikir tentang dirinya sendiri sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batasbatas tertentu.
- M.J. Heskovits menulis, bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- J.L. Gilin J.P. Gilin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang tersebar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan

³ Soerjono Soekamto, Kamus Sosiologi Baru (Jakarta: CV Rajawali. 1983), 355.

⁴ Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 102.
5 Ibid.

⁶ W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),636.

Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), 11.

yang sama . Masyarakat itu memiliki pengelompokan-pengelompokan yang kecil.

4. Agaknya lebih terperinci definisi Mac Inver yang berbunyi bahwa masyarakat adalah suatu sistem daripada cara kerja dan prosedur, daripada otoritas dan saaling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertebtu dan mempunyai (undang-undang) yang mengatur tat hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.

Dengan demikian pengertian partisipasi masyarakat disini adalah keikut sertaan atau terlibatnya masyarakat terhadap suatu kegiatan atau organisasi sosial baik secara moril (fisik) maupun spiritual (non fisik) untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama. Yaitu keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Islam/Madrasah Ibtida'iyah.

2. Dasar dan tujuan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan/organisasi termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan Islam (madrasah) mempunyai dasar yang kokoh, dengan kata lain memiliki dasar yang menjadi tumpahan segala pandangan dan kegiatan yang mendorong partisipasinya terhadap sesuatu masalah yang akan dibina.

Dasar-dasar tersebut adalah:

a. Dasar Agama

Tentang dasar agama yang mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan adalah bersal dari sumber agam itu sendiri (Islam) yaitu bersumber pada Al Qur'an dan Hadits.

Dasar yang berasal dari Al Qur'an

Dalam hal ini tidak lepas dari hakekat manusia sebagai mahluk sosial disamping sebagai mahluk individu, manusia tidak dapat hidup seorang diri atau ter-

8 Hartono, Arnicun Aziz, Ilmu sosial Dasar (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), 88-89.

sah dari orang lain.

Manusia sentiasa hidup dalam kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga, masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan aturan hidup didalam masyarakat. Dalam hal ini Al Qur'an telah memberikan tuntunan agar manusia bertolong menolong dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 2:

يَأْيَّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُو الْا تَحِلُواْ الشَّعَاتَرَا اللهُ وَلَا الشَّهْرَا لُحَرَامُ وَلَا الْمَدْيَ وَلَا الْمَلَائِدُ وَلَا آلِيَّنَ اللِيَّتَ اللِيَّتَ اللَّيْتَ اللَّيْتَ اللَّيْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِ مَنَكُمْ شَنَانُ الْحَرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِ مَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللِيرَوَالتَّقُوى وَلَا تَعَا فَوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu halalkan (rusakkan) syi'ar-syi'ar Allah, jangan bulan haram (bulan suci), jangan hadiah dan jangan pula hewan-hewan yang diberi kalung (untuk dihadiahkan ke tanah suci), dan jangan (kamu halangi) orang-orang yang ziarah ke baitul haram (Mekkah) sedang mereka itu mengharapkan karunia daripada Tuhan mereka dan keridlaan-Nya. Apabila kamu telah halal (Sempurna mengerjakan haji), bolehlah kamu berburu binatang. Janganlah kamu tertarik berbuat aniaya, karena kebencianmu kepada suatu kaum yang menghalangimu daripada masjid al haram. Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.

Dan dalam ayat yang lain juga diterangkan (surat At Taubah ayat 71):

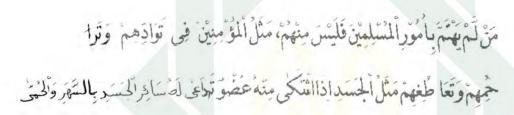
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ أُمِّأَمْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَمِنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيِفِيمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوْنَ الْزَكُوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللهَ وَرَسْولهُ * اوُلِيكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللهُ *. إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ *

⁹ Mahmud Yunus, Terjemahan Al Qur'anul karim (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), 97.

Artinya: Orang-orangyang beriman laki-laki dan perempuan setengahnya menjadi wali bagi yang lain. Mereka menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari pada yang mungkar, lagi mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, serta patuh mengikut Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. 10

Dengan ayat diatas maka jelaslah bagi kita, ummat Islam telah diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan termasuk didalamnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

2. Dasar dari Al Hadits



Artinya: Barang siapa yang tidak mengiraukan terhadap urusan-urusan orang Islam maka ia bukan termasuk golongan dari orang Islam. Perumpamaan orang mu'min adalah saling mencintai, seumpama sebatang tubuh apabila merasa sakit salah satu anggota tergangulah seluruh tubuh dengan tidak tidur dan demam.

(Hadits riwayat muslim dari Nu'man bin Basyir).

b. Dasar Yuridis Formal

Dasar yuridis formal yaitu dasar-dasar yang ebrasal dari perundang-undangan. Adapun dasar dari segi yuridis formal tersebut adalah :

1. Dasar Ideal

Yang dimaksud dasar ideal aadlah falsafah negara yaitu Pancasila, dimana sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada butir pertama menyatakan "Menyatakan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasan kekeluargaan dan kegotong royongan.

Ini berarti setiap insan telah diberi wewenang untuk mengembangkan sikap

¹⁰ Ibid, 179.

¹¹ Imam Muslim, alih bahasa: Ma'mur Daud, Shoheh Muslim II (Jakarta: Wijaya, 1984), 216.

kegotong royongan dalam segenap aspek kehidupan untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosian termasuk dalam pelaksanaan pendidikan.

Dasar Struktural

Yang dimaksud dengan dasar struktural adalah Undang-undang Dasar 1945, hal ini menyangkut per masyarakat dibidang pendidikan. Dalam bab XIII pasal 31 tentang pendidikan, dinyatakan pada ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 12

Dasar Operasional

Dasar operasional adalah dasar yang berasal dari Garis-garis Besat Haluan Negara (GBHN), dimana pada ketetapan MPR no II/MPR/1988 menyatakan :

- (a) Pendidikan merupakan proses budaya untuk mengankat harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kerena itu pendidikan merupakan yanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- (b) Perguruan swasta sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, perlu terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Walaupun dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan mempunyai dasar yang kokoh baik dari sudut agama maupun dari dasar hukum negara.

Tujuan partisipasi masyarakat

13 GBHN 1993-1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 89.

¹² Undang-Undang Dasar 1995, 7.

Tujuan adalah arah, haluan yang dituju, sasaran, maksud, tuntut an. 14

Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan partisipasi addalah apa yang menjadi maksud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dalam usaha mengembangkan pendidikan Islam agar dengan partisipasi dari masyarakat tersebut madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

Madrasah dengan pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan bagi ummat indonesia yang telah berurat dan berakar dalam nilai budaya bangsa dan sejak lama telah ikut serta mencerdaskan bangsa adalah sejalan dengan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Leh karena itu penyelenggaraan madrasah dan pendidikan Islam adalah melaksanakan tugas sebagai lembaga pend yang bersifat umum bagi rakyat yang memerlukannya senantiasa diarahkannya senantiasa diarahkannya senantiasa diarahkan kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Madrasah dan pendidikan Islam yang existensinya semakin mantab sesuai dengan SKB tiga menteri adalah dalam kesatuan kerangka Sistem Pendidikan Islam. Oleh karena itu madrasah dan pendidikan Islam sebagai subsistem dalam kesatuan sistem pendidikan nasional manifestasi dari aspirasi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Madrasah dan pendidikan Islam oleh masyarakat yang kebanyakan berstatus swata. Dalam bukunya Malik Fjar, "Madrasah dan tantangan modernitas" disebutkan:

Besarnya jumlah madrasah swasta memang berkaitan dengan sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, yaitu peran-peran masyarakat dalam membangun madrasah dan pesantren sangat besar. Anggota masyarakat, karena motivasi agama, banyak yang menyediakan wakaf atau dana pembangunan madrasah dan pesantren sehingga jumlah madrasah sangat besar. 15

Dep. P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 965.
 Malik Fajar, Madrasah Dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1998), 77.

Oleh karena itu pembinaan madrasah harus diarahkan kepada tercapainya citacita nasional dan tujuan pendidikan nasional, sehingga tanggung jawabnya tetap diletakkan ditangan masyarakat sendiri dan pemerintah berperan untuk memberikan dorongan dan bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan.

Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa existensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat dalam mencapai tujuan dan perkembangannya. Dan dari dapat disimpulkan bahwa tujuan partisipasi masyarakat adalah turut sertanya masyarakat untuk menggerakkan pembangunan dibidang pend dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama akan pend dan sekaligus mewujudkan lembaga (wadah) yang potensial sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan masyarakat dan pemerintah.

3. Bentuk (tahapan) Partisipasi Masyarakat

Berbicara tentang bentuk (tahapan) partisipasi masyarakat, Taliziduhu Ndraha menyebutkan sebagai berikut :

- a. Partisipasi melalui kontek dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan /menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan, termasuk keputusan poloitik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan renca

na dan sejauh hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 16

Dalam hal ini Hoofsteede sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin dalam buku "Pembangunan Masyarakat " membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) ialah partisipasi yngan mengundang inisiatif dari seorang pemimpin baik secara formal maupun informal mengenai suatu kegiatan
- b. Partisipasi legitimasi (legitimation participattion) yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan mengenai kegiatan tersebut.
- c. Partisipasi exekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.¹⁷

Dari ketiga tahapan partisipasi diatas, partisipasi inisiasi mempuyai kadar yang lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan partisipasi eksekusi. Karena masyarakat tidak hanya sekedar menjadi obyek kegiatan (pelaksanaan pendidikan) saja, tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan kalau masyarakat ikut hanya dalam tahap pembicaraan saja padahal pelaksanaan pendidikan sudah terlaksana, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi saja. Sedangkan partisipasi eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi diatas. Dalam partisipasi eksekusi masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakan kegiatan tersebut.

Kita seharusnya menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu untuk kepetingan masyarakat itu sendiri. Rasa berkepentingan sebaiknya ditanamkan dalam diri masyarakat. Masyarakat tidak merasa memiliki kalau suatu pembangunan tidak mengikutsertakan mereka. Kementrian Pengerahan Tenaga Rakyat dalam bukunya Khairuddin, menyatakan bahwa:

Apabila kita berpendirian bahwa pelaksanaan pembangunan tidak ada orang lain yang harus melaksanakan selain masyarakat sendiri, maka dengan sendirinya pula haruslah disusun rencana pembangunan yang disusun oleh

¹⁶ Ndraha, Pembangunan, 104.

¹⁷ Khairuddin H, Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Liberty, 1992), 125.

rakyat dan pemerintah bersama-sama. Memang amat sukarlah melaksanakan pembangunan apabila dalam perencanaannya rakyat tidak diikutsertakan. 18

Berpijak dari kenyataan diatas, maka dapat dipahami pentingnya untuk menggerakkan masyarakat rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak diperlukan adanya dalam proses pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar angkatan kerja Indonesia. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan berfungsi untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan tercermin dalam perubahan sikap mental.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya partisipasi masyarakat

Tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Ternyata adanya kesadaran tersebut kerena didorong oleh faktor faktor tertentu yang ada dalam diri masing-masing individu.

Jika ditinjau dari segi motivasinya, faktor adanya partisipasi masyarakat adalah karena :

- a. Takut atau terpaksa.
- b. Ikut-ikutan.
- c. Kesadaran 19

Partisipasi yang dilakukan anggota masyarakat dengan perasaan takut atau terpaksa biasanya dilakukan oleh perintah pimpinan yang bersifat otoriter. Masyarakat merasa terpaksa untuk ikut serta alam suatu kegiatan karena dalam dirinya diliputi perasaan takut untuk menentangnya. Hal yang demikian hasilnya kurang memuaskan, terutama bagi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi karena ikut-ikutan ini terjadi bukan kerena kesadaran yang timbul dari dalam hatinya, melainkan kerena merasa didorong oleh rasa kebersamaan yang tinggi dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat desa, apalagi kalau dalam suatu kegiatan pemimpin mereka yang memulai.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, 126.

Sedangkan motivasi motivasi partisipasi masyarakat yang ketiga yaitu karena kesadaran. Partisipasi karena kesadaran adalah partisipasi yang timbul karena kehendak diri pribadi anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat melakukan suatu kegiatan yang dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri, bukan karena paksaaan atau ikut-ikutan. Dalam hal ini masyarakat dapat menerima pembangunan karena mereka sadar bahwa pembangunan tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka juga. Partisipasi yang didorong oleh rasa kesadaran yang akan membuahkan hasil yang lebih memuaskan, baik bagi pemimpin maupun bagi pihak masyarakat.

Dalam buku "Pembangunan masyarakat ", disebutkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kapada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.²⁰

Demikian tinjauan kami seputar partisipasi masyarakat. dari sini mudahmudahan dapat membimbing arah berfikir kami pada permasalahan yang sebenarnya.

B. MADRASAH IBTIDA'IYAH

Di negara kita Indonesia ini ada dua macam lembaga pendidikan formal tingkat dasar, yaitu yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang lebih dikenal dengan nama Sekolah Dasar yang lebih banyak memberikan pelajaran umum, dan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Departemen Agama yaitu Madrasah Ibtida'iyah, yang bergerak dibidang agama Islam. Masing-masing lembaga ada yang negeri dan ada pula yang swasta. Lembaga pendidikan negeri adalah yang didirikan atas kehendak pemerintah dan

²⁰ Ndraha, Pembangunan, 105.

dananya sebagian besar dari pemerintah juga. Sedang lembaga pendidikan swasta adalah yang berdirinya dilatar belakangi oleh kehendak suatu organisasi atau masyarakat masyarakat setempat. Yang akan dibicarakan dalam penulisan ini nanti adalah Madrasah Ibtida'iyah.

1. Pengertian Madrasah Ibtida'iyah

Madrasah merupakan isim makan dari "darasa" yang berarti *tempet duduk* untuk belajar. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam).²¹

Menurut surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud dengan madrasah ialah :

Lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Sementara itu madrasah mencakup tiga tingkatan, yaitu:

- a. Madrasah Ibtida'iyah, setingkat SD
- b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat SMP
- Madrasah Aliyah, setingkat SMA.²²

Sementara itu dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa ;

Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtida'iyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan mengenai Madrasah Aliyah disebutkan sebagai Sekolah Menengah Umum (SMU) yeng berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh departemen Agama. 23

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa Madrasah Ibtida'iyah merupakan lembaga pendidikan umum yang berciri khas agama Islam setingkat dengan sekolah dasar dan diselenggarakan oleh Departemen Agama.

²¹ Poerwadarminta, kamus, 618.

Hasbullah, Sejarah Pend Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1996), 181.

121 Ibid. 189.

2. Kurikulum Madrasah

Kurikulum adalah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepda siswa (anak didik) dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah, baik diluar maupun didalam lingkungan didnding sekolah.²⁴

Kurikulum merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan dalam upaya merealisasikan pendidikan. Usaha untuk menyempurnakan dan menyusun kurikulum madrasah itu dengan memperhatikan fungsi madrasah sebagai lembaga pendidikan. Usaha itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi belajar secara optimal agar anak didik dapat mencapai tujuan pend yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyempurnaan kurikulum itu disebabkan oleh kurikulum yang dahulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Sedangkan dalam pembinaan dan pengembangan sertaa penyempurnaan kurikulum itu tentu saja harus mempunyai landasan yang kuat. Landasan atau dasar penyusunan kurikulum itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid Syarif segabai berikut:

Pembinaan dan pengembangan kurikulum memerlukan landasan yang kokoh, agar kurikulum memerlukan landasan yang kokoh, agar kurikulum fungsional sebagai titik akhir pengembangan kurikulum. Landasan filosofis merupakan landasan yang bertolak dari hasil pemikiran filsafat bagi penentuan tujuan pendidikan. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kebutuhan dan tututan masyarakat, agar anak mampu menjawab kehidupan masyarakat. landasan psikologis berkaitan dengan bagaimana kurikulum itu disusun sesuai dengan kewajiban anak dan mampu mendorong anak belajar. Landasan organisatoris berhubungan dengan bagaimana pengalaman belajar itu diorganisir. Agar dengan mudah disajikan kepada anak didik. 25

Adapun penyusuna kurikulum itu tentu saja mempunyai tujuan . sebagaimana dalam pasal 37 UU Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa :

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikaan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu

Zakiayah Darajat, metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 83.
 A. Hamid Syarief, Pengembangan Kurikulum (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 133.

pengetahuan dan teknologi seta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. 26

Terwujudnya penyempurnaan kurikulum yang merupakan salah satu diantara berbagai upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah dengan herapan agar dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijabarkan dalam tab MPR-RI No II/MPR/1993.

Untuk menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini, maka Departemen Pendidikan dan Departemen Agama telah memberlakukan kurikulum tahun 1994 sebagai pengganti kurikulum yang berlaku sebelumnya.

Kurikulum 1994 ini terdiri atas kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kurikulum yang berlaku secara nasional telah tertuang dalam keputusan Menteri Agama, masing-masing No. 372/1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam (Madrasah Ibtida'iyah dam Madrasah Tsanawiyah), No 373/1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan. Kurikulum madrasah itu masing-masing terdiri atas buku landasan, Progran dan Pengembangan, Buku Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.

Diantara bagian dari isi pokok ketentuan-ketentuan tersebur ialah mengenai program pengajaran, dimana ditentukan bahwa setiap madrasah pada tingkat masing-masing wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun secara nasional. Gambaran isi program kurikulum tersebut dapat dilihat dalam tabel XVI.

Dari tabel dapat dilihat bahwa alokasi mata pelajaran agam di madrasah sangat sedikit. Oleh karen itu jika berharap dari kurikulum muatan nasional untuk intrakurikuler ini saja tentu tidak dapat memunculkan ciri khas madrasah dengan baik dan memiliki nilai tambah dibanding lembaga pendidikan umum yang sederajat.

27 Fajar, Madrasah, 91.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), 15.

Terlebih-lebih untuk melahirkan orang-orang yang ahli dan menguasai pengetahuan agama Islam secara mendalam.

Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakulikuler sebagaimana tergambar diatas, dalam kurikulum 1994 juga telah diatur kurikulum yang bersifat lokal ini pada dasarnya ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak lain yang terkait, dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum ynag berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 28

Telah dikemukakan diatas, bahwa pada Madrasah Ibtida'iyah wajib diberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan Sekolah Dasar. Oleh sebab itu, kurikulum yang dikembangkan di Madrasah untuk mata pelajaran umum, sepenuhnya mengacu kepada kurikulum sekolah umum (SD). Sedangkan ciri khas agama Islam dikembangkan melalui tiga bentuk, yaitu:

- Penjabaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi lima pelajaran, yaitu :
 - (a) Al Qur'an Hadits
 - (b) Figh
 - (c) Aqidah akhlak
 - (d) Sejarah Kebudayaan Islam
 - (e) Bahasa Arab
- 2. Penciptaan suasana keagamaan, antara lain melalui :
 - (a) Suasana kehidupan madrasah yang agamawi
 - (b) Adanya sarana ibadah
 - (c) Penggunaan metode pendekatan yang agamawi dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan.
- Kualifikasi guru, antara lain guru madrasah, harus beragama Islam dan berakhlak mulia.

¹⁸ Fajar, Madrasah, 89-90.

²⁸ Hasbullah, Sejarah, 197.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa kurikulum lokal dan kurikulum ciri khas dapat dikembangkan pada madrasah sepanjang ketersediaan waktu dan kesempatan masih memungkinkan, dengan tidak boleh mengurangi dan bertentangan dengan kurikulum yang diatur secara nasional.

Tujuan Lembaga Pendidikan Madrasah

Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang hendak dicapainya. Madrasah (Madrasah Ibtida'iyah) sebagai lembaga pendidikan Islam dalam penyelenggaraannya tentu saja juga menpunyai tujuan yang selaras dengan Islam yaitu terbentuknya pribadi manusia dewasa yang paripurna menurut ukuran Islam.

Dengan adanya tujuan lembag pendidikan tersebut, segala aktifitas pendidikan dapat diarahkan unutk mencapai tujuan yang sudah digariskan oleh lembaga yang bersangkutan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam kelangsungan penyelenggaraannya punya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, segaimana yang dikutip oleh An Nahlawi, antara lain:

- a. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip fikir, akidah dan tasri' yang dia arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar ia tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya.
- c. Memberikan seperangkat peradaban dan kebudayaan islami pada anak didik dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial, ilmu eksakta dengan landasan ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya pada perkembangan dan teknologi.
- d. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subyektifitas (emosi) karena pengaruh jaman dewasa ini.
- Memberikan wawasan niali dan moral, serta peradapan manusia yang membawa khasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang.
- f. Menciptakan kesatuan dan kesamaan antar anak didik.
- g. Mengkoordinasi dan membenahi kegiatan pendidikan.
- Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid dan pesantren.³⁰

Dengan demikian lembaga pendidikan madrasah mempunyai wewenang untuk menciptakan situasi belajar yang optimal, dapat mencetak anak-anak didik yang di ha

³⁰ Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 308.

rapkan oleh bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan cuta-cita luhur agama Islam, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil pendidikan yang diperoleh masing-masing warga negara yang dapat disumbangkan kepada individunya sendiri.

Madrasah disamping berdasarkan ajaran Islam, juga dilandasi falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan sekolah umum yang setingkat. Tujuan lekembagaan merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap jenis madrasah sebagai satu kesatuan sistem. Segala kegiatan belajar-mengajar baik yang program akademik, keterampilan maupun pendidikan, agama dan pendidikan moral pancasila disusun dan direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum didalam tujuan institusional, dan tujuan ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan Pendidikan Nasional yang telah digariskan dalam GBHN.

Adapun tujuan instruksional Madrasah Ibtida'iyah adalah sebagai berikut :

- Tujuan instruksional umum Madrasah Ibtida'iyah ialah agar murid :
 - (a) Memiliki sikap dasar sebagai warga negara yang baik
 - (b) Memiliki sikap dasar sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia.
 - (c) Memiliki kepribadian yang ulat dan utuh, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.
 - (d) Memiliki pengalaman , pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran kemadrasah tsanawiyah atau sekolah lanjutan pertama.
 - (e) Memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan tujuan hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Tuhan yang maha Indonesia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 2. Tujuan Institusional Kusus Madrasah Ibtida'iyyah ialah agar murid :
 - (a) Dalam bidang pengetahuan:
 - Memiliki ilmu dasar tentang ilmu agama Islam dan sejarah kebudayaan Islam.
 - Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kewarganegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - Memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan, kesejahteraan keluarga dan kependudukan.
 - Mimiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

- Memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai alat untuk memehami ajaran agama Islam.
- Memiliki pengetahuan dasar tentang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Memiliki pengetahuan dasar tentang Ilmu Penetahuan Sosial.
- Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai unsur kebudayaan nasional.
- (b) Dalam bidang keterampilan:
 - Dapat Mengamalkan Pokok-pokok ajaran agama Islam.
 - Dapat belajar dengan cara yang baik.
 - Dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan.
 - Dapat membuat pola dasar kalimat dalam bahasa Arab.
 - Dapat memecahkan pengalaman sederhana berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai.
- (c) Dalam bidang Nilai dan Sikap :
 - Cinta terhadap ajaran islam dan berkeinginan untuk mengenalkannya.
 - Menerima dan mau melaksanakan Pancasila dan UUD1945.
 - Memiliki sikap demokretis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia, bangsa serta lingkungan sekitarnya.
 - Menghargai tradisi kebudayaan Nasional.
 - Mematuhi disiplin dan peraturan yang berlaku.
 - Berminat dan bersikap positip serta konstruktip terhadap kegiatan olahraga dan kehidupan yang sehat.
 - Menghargai setiap jenis pekerjaan dan usaha yang halal.
 - Menghargai waktu, hemat dan produktif³¹.

Dengan uraian diatas, jelaslah bahwa tujuan lembaga pendidikan madrasah itu pada hakekatnya sama dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Metode Pengajaran di Madrasah

Mendidik, disamping sebagai ilmu juga sebagai "Suatu Seni."32

Seni mendidik atau mengajar disini yang dimaksud dengan metode pengajar adalah:

³¹ Zakiayah Darojat, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 106-108.

³² H. Zuhairini, Abdul Gofir, Slamet As, Yusuf, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 68.

- Merupakan salah satu komponen daripada proses pendidikan.
- Merupakan alat mencapai tujuan, yang didukung alat-alat bantu mengajar
- Merupakan kebulatan dalam suatu sistem pendidikan.

Metode mengajar sebagai alat pencapai tujuan, maka diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan dengan sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting sebelum seseorang menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Kekaburan didalam tujuan yang akan dicapai menyebabkan kesulitan dalam memilih dan menentukan metode yang tepat. Hal yang demikian harus benar-benar diperhatikan oleh seorang guru.

Metode mengajar banyak sekali ragamnya. Metode-metode itu dimaksudkan agar bisa mengembangkan kesadaran siswa baik sebagai individu, sikap sosial dan hal tertentu melalui proses pendidikan (proses belajar mengajar).

Mahfudh Sholahuddin dalam bukunya Metode Pendidikan Agama, membagi metode mengajar menjadi tiga klasifikasi/bagian yaitu :

- Untuk mengembangkan kemampuan dan kesadaran siswa sebagai individu, guru sebaiknya menggunakan metode individual, misal ; eksperimen, asigmen dan inquiri.
- Untuk mengembangkan sikap sosial, guru sebaiknya menggunakan metode menggunakan metode yang bersifat kelompok, misalnya; diskusi, kerja kelompok dan sosio drama.
- Sedang dalam hal tertentu digunakan oula metode yang bersifat klasikal, misalnya; ceramah, tanya jawab dan demonstra.

Dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan tujuan ataupun sifat materi, maka dapat diharapkan guru akan lebih berhasil. Karena penggunaan metode ini perlu ditekankan, mengingat adanya kecenderungan guru untuk mengajar dengan satu metode saja, yaitu ceramah, sehingga menyebabkan timbulnya istilah "sekolah dengar" atau "sekolah duduk". Cara demikian tidak menguntungkan dalam rangka membina dan mengembangkan kesaddaran siswa/jiwa, karena siswa cenderung pasif.

³³ Mahfudh Sholahuddin, Metode Pendidikan Agama (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29-30.

Madrasah Ibtida'iyah, sekolah yang bercirikan Islam yang kedudukannya sama dan sederajat dengan sekolah dasar (umum) juga menggunakan dan mengembangkan metode-metode tersebut dalam proses belajar mengajarnya. Berikut ini beberapa metode mengajar, antara lain :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah atau metode khotbah yang oleh sebagian para ahli, metode ini disebut "one manusia show" adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran secara lisan oleh guru didepan kelas atau kelompok.³⁴

Dalam metode ceramah, murid duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang diceramahkan guru itu adalah benar, murid mencatat ikhtisar ceramah semampu murid itu sendiri dan menghafalkannya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan.

Metode ceramah sebagai metode mengajar yang paling tua umurnya dan paling banyak digunakan disekolah-sekolah dapat dipasang sebagai cara yang paling mengena bagi usaha untuk penyampaian informasi, oleh karena memiliki keistimewaan-keistimewaan sebagai berikut:

- Biayanya murah, sebab alat penyampai (media) bahan pelajaran hanyalah suara guru.
- b. Dapat menyajikan bahan pelajaran kepada sejumlah besar murid (kelas) didalam waktu yang sama.
- c. Mudah mengulang kembali jika diperlukan.
- d. Metode ceramah dapat memberikan kesempatan pada murid-murid untuk memperoleh latihan mendengarkan dan membuat catatan-catatan singkat.
- e. Bahan ceramah yang dipersiapkan dengan baik dan di sajikan secara sistematis dapat menghemat waktu belajar bagi anak didik.³⁵

Metode Eksperimen

Metode ini biasanya dilakukan dalam suatu pelajaran dimana guru dan murid bersama-sama mengajarkan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang diketahui

35 Ibid

³⁴ Ibid, 43.

(misalnya : mengadakan eksperimen tentang tanah/debu yang dapat digunakan untuk tayamum). 36

Metode ini biasanya dilakukan dalam suatu pelajaran tertentu seperti ilmu alam, ilmu kimia dan sejenisnya terhadap ilmu-ilmu lam yang didaalam penelitiannya menggunakan metode yang sifatnya obyektif, baik dilakukan didalam/diluar kelas maupun dalam suatu laboratorium tertentu.

Metode eksperimen ini hendaknya diterapkan bagi pelajaran yang belum diterangkan/diajarkan oleh metode lain sehingga terasa benar fungsinya. Kerena setelah diadakan percobaan-percobaan barulah guru memberikan penjelasan dan kalau perlu diadakan diskusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam eksperimen tersebut.

Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauhmana murid dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diceramahkan.

Anak didik yang biasanya kurang mencurahkan perhatiannya terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode ceramah akan berhati-hati terhadap pelajaran yang diajarkan melalui metode tanya jawab. Sebab anak didik tersebut sewaktu-waktu mendapat giliran untuk menjawab suatu pertanyaan yang akan diajukan kepadanya.

Metode tanya jawab dapat dipakai oleh guru untuk menetapkan perkiraan secara umum apakah anak didik yang mendapatkan giliran pertanyaan sudah memahami bahanpelajarn yang sudah diberikan.

4. Metode Pemberian Tugas

Metide pemberian tugas yaitu suatu cara dalam proses belajar mengajar bila mana guru memberikan tugas tertentu dan murid mengerjakannya, kemudian tugas

³⁶ Zuhairini, Metodik, 94.

tersebut dipertanggung jawabkan kepada guru. 37

Pusat kegiatan metode ini berada pada murid-murid dan mereka disuguhi bermacam masalah agar mereka menyelesaikannya, menanggapi dan memikirkan masalah itu.

Metode ini biasanya diberikan guru sebagai pekerjaan rumah. Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara pemberian tugas dan pekerjaan rumah. Perbedaan itu ialah ·

Untuk pekerjaan rumah guru menyuruh membaca dari buku di rumah, 2 hari lagi emberikan pertanyaan-pertanyaan di kelas. Tetapi dalam pemberian tugas guru menyuruh membaca, juga menambahkan tugas-tugas :

1. Cari buku-buku lain, untuk membedakan/membandingkan.

Pelajarilah keadaan orang tuanya, masyarakatnya.

5. Metode Drill (latihan)

Penggunaan istilah latihan sering kali disamakan artinya dengan istilah ulangan. Padahal maksudnya berbeda. Latihan bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi miliki anak didik dan dikuasai sepenuhnya, sedangkan ulangan hanyalah untuk sekedar mengukur sejauh mana dia telah menyerap pengajaran tersebut.

Pengajaran yang diberikan melalui metode drill dengan baik selalu akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

a. Anak didik itu akan dapat mempergunakan daya berfikirnya yang makin lama makin bertambah baik, karena menjaddi lebih teratur dan lebih teliti dalam mendorong daya ingatnya. Ini berarti daya berfikir bertambah.

b. Pengetahuan anak didik bertambah dari berbagai segi, dan anak didik tersebut akan memperoleh paham yang lebih baik dan lebih mendalam. Guru berkewajiban menyelidiki sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh anak didik dalam proses belajar mangangajar. Salah satu cara ialah mengukur kemajuan tersebut melalui ulangan (tes) tertulis atau lisan. 39

³⁹ Darajat, Metodik, 302-303.

³⁷ Zakiyah Darajat, metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 298. 38 Roestiyah N.K, Didaktir Metodik (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 75.

5. Evaluasi Pendidikan di Madrasah

Yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. 40

Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai dimana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan.

Adapun ruang lingkup kegiatan evaluasi pendidikan mencakup penilaian terhadap kemajuan belajar (hasil belajar) murid dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesudah mengikuti program pengajaran.

Adapun fungsi dan tujuan evaluasi terhadap murid-murid di sekolah dapat digolongkan atas empat bagian :

a. Evaluasi Formatif:

Untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar-mengajar dan mengadakan remedial (perbaikan) program bagi murid.

Dengan demikian evaluasi formatif adalah evaluasi hasil belajar jangka pendek, yaitu evaluasi hasil belajar pada akhir setiap satuan pelajaran.⁴¹

b. Evaluasi Sumatif

Untuk menentukan angka-angka kemajuan/hasil belajar masing-masing murid yang antara lain untuk pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid.

Evaluasi sematif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang, yaitu evaluasi hasil belajar pada akhir catur wulan akhir tahun ajaran dari keseluruhan program. 42

c. Evaluasi Placement (penempetan)

Untuk menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat/program pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan (karakteristik) lainnya yang dimiliki.

⁴⁰ Zuhairini, Metodik, 154.

⁴¹ Ibid. 155.

⁴² Ibid.

d. Evaluasi Diagnostik

Untuk mengenal latar belakang (psikologis, phisik dan milieu) murid yang mengalami kesulitan-kesulitan tersebut/membantu memecahkan kesulitan –kesulitan belajar yang dialami oleh murid-murid tersebut dilaksanakan dengan evaluasi diagnostik.

Dengan memperhatikan evaluasi belajar jangka pendek dan jangka panjang, maka jenis evaluasi pendidikan dapat dibagi menjadi tiga macam :

- Evaluasi harian yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan sehari-hari baik diberitahukan lebih dahulu ataupun tidak.
- 2. Ulangan umum yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir catur wulan.
- 3. Evaluasi pada akhir tahun ajaran, terhadap murid tingkat akhir.

Adapun pelaksanaan kegiatan jenis evaluasi tersebut dilihat pada tabel XVII.

Tehnik evaluasi yang digunakan di sekolah dapat dibedakan kedaalam dua golongan pokok, yaitu :

- Tes : untuk menilai kemampuan murid yang meliputi pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil belajar, bakat khusus dan intelegensi, terdiri dari :
- a. Uraian (Essay Test)
 - (1) Uraian bebas (free essay)
 - (2) Uraian terbatas (limited essay)
- b. Obyective Test
 - (1) Betul salah (true false)
 - (2) Pilihan ganda (multiple choice)
 - (3) Menjodohkan (matching)
 - (4) Isisan (completion)
 - (5) Jawaban singkat (short answer)
- c. Bentuk Test Lain

Selain bentuk essay tets dan obyektive test terdapat bentuk tes yang berbeda antara lain :

- (1) Bentuk ihktisar
- (2) Bentuk laporan
- (3) Bentuk khusus dalam pelajaran bahasa.
- 2. Non Test : untuk menilai karakteristik lainnya, misalnya, misalnya minat, sikap dan kepribadian murid terdiri dari antara lain :
 - a. Observasi terkontrol
 - b. Wawancara/interview, rating scale
 - c. Invetory

Ditinjau dari alat yang dipergunakan murid dalam mengerjakannya, tes dibagi menjadi jenis :

- 1. Tes tertulis (written tets)
- 2. Tes lisan (oral test)
- 3. Tes perbuatan (performance test)

Aspek yang bersifat kognitif (ingatan, pemahaman dan sebagainya), biasanya dinilai melalui test tertulis ataupun test lisan, sedangkan test perbuatan lazimnya dipergunakan untuk menilai aspek kemampuan yang bersifat keterampilan (psikomotor).

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRA-SAH IBTIDA'IYAH

Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan (Madrasah Ibtida'iyah) merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya suatu pendidikan. Dalam proses operasionalisasi kependidikan terdapat komponen-komponennya yang dapat menentukan keberlangsungannya ke arah pencapaian tujuan pendidikan yaitu:

- Guru atau pendidik yang semakin berkompeten dalam profesi atau tugas kependidikannya.
- Anak didik yang menjadi sasaran pendidikan adalah merupakan tempat persemaian benih-benih ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dikembangkan oleh guru atau pendidik.
- Sarana pendidikan baik berupa fisik seperti tempat belajar, alat peraga maupun non fisik seperti kurikulum, metode pendidikan, suasana pendidi-

kan, dan sebagainya, adalah suatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan

4. Sekitar atau lingkungan yang mambantu terlaksananya proses pendidikan seperti masyarakat sekitar termasuk keluarga dan kondisi sosial ekonomis masyarakat pada umumnya, adalah suatu faktor yang dapat membantu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

 Cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami atau

mengetahuinya. 43

Dari kelima komponen pendidikan diatas, dapat dipahami bahwa berlangsungnya pelaksanaan pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Dalam arti peran serta masyarakat bisa membuat suatu kondisi yang ada baik psikis lingkungan maupun kondisi psikis manusia. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan pendidikan sangat berhubungan dengan perubahan dan pengembangan dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Margono Slamet, dalam konsepsi tentang macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, menyatakan bahwa terdapat tiga macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, antara lain :

Kekuatan mendorong (motivasi forces), kekuatan mana terdapat dalam masyarakat dan bersifat mendorong orang-orang untuk berubah. Hal ini dinilai sebagai kondisi atau keadaan yang penting sekali, oleh karena tanpa adanya kekuatan tersebut orang tidak akan berubah. Kekuatan ini berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan untuk melakukan perubahan. Kekuatan ini bersumber dari :

- Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain.
- Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya bias ada
- Adanya tekanan dari luar seperti kompetensi, keharusan penyesuaian diri, dan lain-lain.
- d. Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efosoensi dan peningkatan, misalnya produktifitas, dan lain-lain.⁴⁴

Dari uraian diatas, sudah jelas bahwa perubahan dan pengembangan serta peningkatan sering terjadi bila ada desakan dan motivasi luar sebagaimana yang

⁴³ H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam Dan Umum) (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), ix. ⁴⁴ Ibid.

terjadi dalam sebuah pendidikan tidak menutup kemungkinan untuk selalu membutuhkan sumbangsih dari luar, dalam hal ini adalah masyarakat secara umum baik berupa material maupun kritik yang membangun. Hal ini juga dikemukan oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya Sosiologi Suatu pengantar yang dikutip oleh Soleman B. Taneko, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan, adalah antara lain :

- a. Sistem pendidikan yang maju
- Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
- c. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyinpang
- d. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat
- e. Pendidikan yang heterogen
- f. Ketidakpuasan masyarakat terhadapbidang-bidaang kehidupan tertentu
- g. Diorganisasi dalam masyarakat.
- h. Sikap mudah menerima hal-hal baru.⁴⁵

Sedangkan faktor yang menghalangi jalannya perubahan antara lain adalah :

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat
- b. Sikap masyarakat yang tradisional
- c. Vested interest (kepantingan yang telah tertanam dengan kuatnya)
- d. Prasangka (buruk) terhadap hal-hal baru
- e. Rasa takut akan terjadinya kegoyaan. 46

Sudah jelas kiranya bahwa faktor masyarakat lebih dominan dalam menentukan pelaksanaan pendidikan kearah yang lebih maju dan inovatif. Dimana masyarakat mempunyai kekuatan yang sangat kompleks baik secara kuantitas maupun kualitas. Akan tetapi bukan berarti mematikan kekuatan intern dalam sebuah lembaga pendidikan. Namun faktor pendukung lebih besar dalam masyarakat (lebih-lebih lembaga dari pihak swadaya sendiri/swasta), seperti :

Sembangsih meterial selalu diperlukan bila adanya renovasi gedung,
 perkembangan sarana prasarana dan sebagainya

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Taneko, Struktur, 145

⁴⁶ Thid

- Anak didik yang banyak juga merupakan hal yang urgen bagi peningkatan suatu lembaga, dalam hal ini bila masyarakat tidak perduli dengan pendidikan secara umum dalam lembaga yang ada maka tiddak menutup kemungkinan sekolahan kosong karena tidak ada peserta didik.
- Sumbangsih pemikiran dari tokoh masyarakat atau wali murid bila adanya musyawarah tehunan berupa evaluasi terhadap lembaga berupa kritik dan saran.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam sebuah pendidikan sampai detik ini sangat diperlukan dan penting sekali dalam pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Denagn tercapainya suatu tujuan bersama, maka masyarakat dan lembaga pendidikan harus ada unsur : inovasi/ide baru untuk kemajuan lembaga, komunikasi atau interaksi dengan lembaga dan sistem sosial yang selalu berjalan dengan dinamis.